HARIAN UMUM NusaBali

Dewan Minta RSUD Utamakan Rekrut Warga Lokal

★ Panitia Rekrutmen Libatkan Pihak Ketiga dan Ombudsman

MANGUPURA, NusaBali

Rekrutmen 183 tenaga kontrak di RSUD Mangusada Badung mendapat sorotan DPRD Badung. Bukan terkait pelaksanaan perekrutannya yang jadi perhatian, namun diharapkan perekrutan tersebut lebih mengutamakan masyarakat asli Badung.

"Karena yang dicari tenaga kontrak, kami berharap utamakan orang Badung," ucap anggota DPRD Badung I Wayan Suyasa, Jumat (7/8). "Saya apresiasi pendaftran secara online, tapi ini juga membuka peluang orang luar Badung ikut bekompetisi. Ini akan menyempitkan kesempatan orang Badung."

Tak hanya itu, politisi asal Penarungan, Mengwi, ini mengharapkan agar tenaga kontrak yang dipilih adalah mereka yang betul-betul memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan pihak rumah sakit. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena pelayanan baik adalah tujuan dari pemerintah.

Suyasa juga mengimbau kepada tim rekrutmen agar melakukan seleksi secara transparan. Bilamana terjadi indikasi KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) selaku dewan pihaknya tidak segan-segan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. "Kami harap pelaksanaan rekrutmen ini bisa transparan. Dan tidak dibumbui kepentingan," tandasnya.

Anggota DPRD Badung, I Wayan Luwir Wiana, I Nyoman Mesir, I Nyoman Dirga Yusa, I Nyoman Oka Widyanta, dan I Wayan Sandra juga meminta agar rekrutmen dilakukan secara transparan. Alasan mereka, rumah sakit tersebut milik pemerintah yang seluruhnya menggunakan APBD Badung, termasuk untuk gaji para pegawai.

Oka Widyanta menegaskan hasil rekrutmen tenaga kontrak tahun lalu masih banyak tenaga dari luar Kabupaten Badung. Karena itu tahun ini hal tersebut tidak boleh terjadi. Sehingga rekrutmen wajib memprioritaskan orang Badung sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki. "Di Badung kita tidak kekurangan tenaga, baik medis mapun non medis, harus utamakan orang Badung," tegasnya.

Ketua Panitia Swakelola Kegiatan Perekrutan Tenaga Kontrak RSUD Mangusada Badung dr Ni Raka Setiawati, secara terpisah menegaskan penerimaan pegawai kontrak baru rumah sakit tidak atas dasar pertimbangan nilai dari tes dan wawancara para calon pelamar. Jadi bukan ditentukan berdasarkan kedaerahan. "Penerimaan (pegawai kontrak RSUD Mangusada Badung) atas hasil tes dan wawancara," tegasnya. Karena itu, perekrutan pegawai kontrak dibuka untuk umum.

Terkait dengan harapan anggota dewan agar pelaksanaan perekrutan berjalan transparan, Setiawati menegaskan, transparansi paling diutamakan dalam perekrutan kali ini. Bahkan, sistemnya berbeda dengan pelaksanaan perekrutan yang sudah-sudah. Menurutnya selain menggunakan sistem online, pelaksanaannya pun diawasi langsung oleh Ombudsman.

"Kami juga sudah konsultasikan masalah ini dengan BPKP, sehingga kami menjamin pelaksanaan perekrutan akan berjalan dengan sangat transparan," tegasnya.

Untuk tes tulis pun demikian. Sengaja melibatkan pihak ketiga untuk membuat soal. Sehingga tes betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Pengoreksian soal juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga. "Untuk soal tes dan pengoreksiannya kami bekerjasama dengan pihak Unud. Jadi bukan kami yang bikin soalnya," kata Setiawai.

Untuk diketahui RSUD Mangusada Badung kembali merekrut pegawai kontrak tahun 2015. Pada perekrutan kali ini rumah sakit milik pemerintah tersebut membutuhkan sebanyak 183 pegawai kontrak untuk ditempatkan pada beberapa posisi, seperti dokter spesialis forensik, dokters pesialis rehabilitasi medik, apoteker, hingga perawat. Berbeda dengan perekrutan yang sudah dilakukan sebelumnya, tahun ini pihak rumah sakit memproses pendaftaran melakukan sistem online melalui website resmi RSUD Mangusada (www.rsudkapal.badungkab.go.id) dengan cara mengklik menu career. Pendaftaran dibuka pada 9 – 11 Agustus 2015. **as**

Edisi : Sabtu, 8 Agustus 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Dugaan Mark Up Lahan Undiksha

Penyidik Masih Bidik Tersangka Lain

DENPASAR, NusaBali

Meski sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan mark up pembangunan FOK Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja, namun penyidik masih membidik tersangka lainnya dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 3 miliar ini.

Kasipenkum dan Humas Kejati Bali, Ashari Kurniawan mengatakan, untuk perkembangan kasus dugaan korupsi Undiksha, sampai saat ini penyidik masih fokus melakukan pemberkasan terhadap dua tersangka yang sudah ditahan yaitu I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen) dan I Nyoman Mustiara (makelar tanah). "Sekarang masih fokus pemberkasan dua tersangka ini supaya bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya," jelas Ashari, Jumat (7/8).

Selain Suarsa dan Mustiara, tiga tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (makelar tanah) tinggal menunggu waktu menyusul dua tersangka lainnya masuk bui. Terkait kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini, Ashari enggan berkomentar dengan alasan bisa mengganggu proses penyidikan yang sedang berjalan.

"Sampai sekarang tersangka hanya lima. Soal ada tidaknya tersangka baru, saya tidak tahu," jelas pria asal Jawa Tengah ini.

Namun sumber di Kejati Bali menyebutkan, penyidik masih terus melakukan pengembangan terkait penetapan lima tersangka ini. Diduga masih ada keterlibatan oknum lainnya dalam dugaan mark up lahan FOK Undiksha di Jineng Dalem. "Sekarang masih didalami penyidik soal dugaan adanya keterlibatan oknum lainnya," beber sumber yang enggan disebutkan namanya ini.

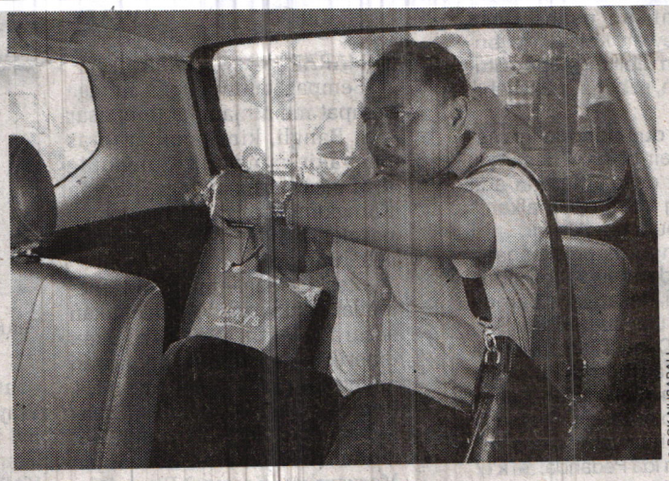

DOK NUSABALI

I Nyoman Mustiara saat dijebloskan ke tahanan.

Dalam aksinya, kelima tersangka yaitu I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen), I Nyoman Mustiara (makelar tanah), Nengah Nawa (Kepala Desa Jineng Dalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha), dan I Dewa Komang Indra (makelar tanah) melakukan mark up harga tanah dari harga Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are. Parahnya lagi, tanah yang digunakan untuk kampus Undiksha ini baru dikuasakan menjual oleh kelima tersangka. Lalu tanah ini akhirnya dilunasi setelah alokasi dana Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan ini cair. Dari perhitungan inilah ada kerugian negara mencapai Rp 3 miliar.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Bali, Akmal Kodrat, Gede Arthana, Wayan Suardi dan Subekan sudah memeriksa puluhan saksi termasuk pejabat Undiksha. Diantaranya Rektor Undiksha, Dr I Nyoman Jampel, mantan Rektor, Prof I Nyoman Sudiana dan Prof I Ketut Seken. Selain itu, dua guru besar Undiksha, Prof Raid dan Prof Suma juga telah diperiksa sebagai saksi. **rez**

Edisi : Sabtu, 8 Agustus 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Pemerintah Pusat Sosialisasi Kebijakan Dana Desa di Badung

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah pusat melaksanakan sosialisasi kebijakan dana desa di Kabupaten Badung, Jumat (7/8). Perwakilan dari tiga kementerian yakni Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hadir pada kesempatan tersebut.

Sosialisasi di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung, dibuka Sekjen Kementerian Keuangan RI Dr Hadiyanto, dihadiri Penjabat Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka, anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, Staf Khusus Kementerian Keuangan Arif Budimanta, Tim sosialisasi dari ketiga kementerian. Hadir pula anggota DPRD Badung Made Sutarma, Sekkab Badung Kompyang R Swandika, para camat, serta perbekel se-Badung.

Hadiyanto menyampaikan, sesuai PP 22 penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi penyaluran dana desa tahap I ke kabupaten/kota mencapai Rp 8,173 triliun. Dana ini setara dengan 98,408% dari alokasi dana desa yang seharusnya disalurkan tahap I yaitu sebesar Rp 8,306 triliun. Realisasi dana desa sebesar Rp 8,173 triliun tersebut disalurkan kepada 433 dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa.

"Total anggaran desa secara nasional untuk tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun, dimana masing-masing desa sedikitnya akan menerima sebesar Rp 254 juta," ucapya.

Khusus untuk Kabupaten Badung, kata Hadiyanto, dana desa tahap I telah disalurkan pada 26 Juni 2015 sebesar Rp 2,293 miliar yang merupakan 40 persen dari alokasi dana desa TA 2015. Sementara keseluruhan sebesar Rp 13,826 miliar. "Sesuai ketentuan, dalam waktu tujuh hari kerja setelah dana desa diterima oleh kas daerah, dana tersebut harus segera disalurkan kepada masing-masing desa, apabila para kepala desa telah menyampaikan peraturan desa mengenai APB Desa," bebernya.

Ditambahkan, untuk road map pemenuhan dana desa tahun 2016 paling sedikit 6% dari total transfer ke daerah dan tahun 2017 paling sedikit 10% dari total transfer ke daerah sehingga di tahun 2017 nanti masing-masing desa akan mendapat dana desa sebesar Rp 1 miliar.

Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan sosialisasi amat penting. Sebab kepala desa akan mendapat tugas yang lebih berat, terlebih dana tersebut akan dimonitor oleh BPK maupun BPKP. "Sebelum melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa, Komisi XI sudah minta kepada BPK dan BPKP untuk terlebih dahulu melakukan pembinaan kepada desa," katanya.

Rai Wirajaya juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Badung yang telah menyalurkan dana untuk desa yang jumlahnya jauh lebih besar dari dana pusat ke desa. Pihaknya mengharapkan dana desa ini dapat dikelola dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat, selain itu pertanggungjawaban dari dana tersebut dapat dilakukan dengan baik sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih Badung dapat dipertahankan.

Penjabat Bupati Badung Harry Yudha Saka menyambut baik dipilihnya Badung sebagai penyelenggaraan sosialisasi kebijakan dana desa. Berkenaan dengan dana desa yang sempat menjadi isu sentral bahkan sempat menjadi polemik diharapkan akan memberi pemahanan yang sama sehingga berbagai tafsir yang sempat muncul selama ini dapat diluruskan.

Yudha Saka berharap sosialisasi ini dapat mempercepat terjalinnya komunikasi, koordinasi, dan pemahaman yang utuh terhadap kebijakan dana desa. Menyinggung soal perhatian pemerintah daerah kepada desa disampaikan jika pada 2015 ini anggaran APBD Badung yang diarahkan untuk desa meliputi; dana desa sebesar Rp 5,7 M lebih, Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 34,5 M lebih, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebesar Rp 237,8 M lebih. Sehingga total dana yang diterima oleh masing-masing desa di Kabupaten Badung berkisar antara Rp 4,6 M sampai Rp 9,7 M. @ as

• NUSABALI/YUDA

PENJABAT Bupati Badung I Nyoman Harry Yudha Saka (kiri) memberikan cenderamata pada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan RI Hadiyanto (ketiga dari kanan) dengan didampingi oleh anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (kedua dari kanan) dan Staf Khusus Kementerian Keuangan Arif Budimanta (kanan) usai menyampaikan sosialisasi kebijakan dana desa pada camat dan perbekel se-Badung di Ruang Kertha Gosana Pusat Pemerintahan Badung, Jumat (7/8).

Edisi : Sabtu, 8 Agustus 2015

Hal : 2

HARIAN UMUM NusaBali

Rp 144,16 M untuk Beasiswa Miskin

Ada beberapa kategori, yakni beasiswa miskin tamatan SMP ke SMKN 1 Denpasar, tamatan SMP ke SMK negeri dan swasta se-Bali, dan untuk SMK langka peminat.

DENPASAR, NusaBali

Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan beasiswa sebesar Rp 144,16 miliar lebih untuk 107.704 siswa miskin pada tahun anggaran 2015.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali Tjokorda Istri Agung (TIA) Kusuma Wardhani di Denpasar, Jumat (7/8), mengemukakan, beasiswa miskin sebesar Rp 144,16 miliar lebih itu terbagi dalam beberapa kategori yakni beasiswa miskin untuk jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, beasiswa miskin tamatan SMP ke SMKN 1 Denpasar, beasiswa miskin tamatan SMP ke SMK negeri dan swasta se-Bali, dan beasiswa miskin untuk SMK langka peminat.

Ia mengemukakan, besaran beasiswa untuk tiap jenjang dan kategori yang diterima siswa itu bervariasi. Untuk jenjang SD, masing-masing siswa mendapatkan Rp 620 ribu per tahun, SMP (Rp 890 ribu), SMA (Rp 2 juta), dan SMK (Rp 3,2 juta). Beasiswa miskin untuk jenjang SD diberikan kepada 56.807 siswa, beasiswa untuk jenjang SMP kepada 21.066 siswa, untuk SMA sebanyak 11.196 siswa, dan 18.059 untuk siswa jenjang SMK.

"Sedangkan beasiswa miskin tamatan SMP ke SMKN 1 Denpasar dialokasikan untuk 150 siswa, masing-masing siswa mendapatkan Rp 22 juta. Demikian juga untuk siswa miskin tamatan SMP ke SMK negeri dan swasta se-Bali kepada 270 siswa, masing-masing mendapatkan Rp 22 juta juga," ujar TIA.

TIA menambahkan, beasiswa miskin untuk SMK langka peminat diberikan kepada 156 siswa, masing-masing mendapatkan beasiswa Rp 5 juta. "Sebenarnya total bansos Disdikpora Bali untuk tahun ini sebesar Rp 145,216 miliar lebih, namun alokasi anggaran sebesar Rp 1,046 miliar lebih digunakan untuk penyelenggaraan paket A, B, dan C. Yang khusus untuk beasiswa miskin jadi Rp 144,16 miliar lebih," tuturnya.

TIA menandaskan untuk menjamin beasiswa miskin tepat sasaran, penerima beasiswa tahun ini tidak lagi memakai sistem jatah dan pihaknya sudah menyosialisasikan hal tersebut kepada disdikpora kabupaten dan kota serta para kepala sekolah.

"Kami sudah buatkan sistem grade untuk menetapkan siswa miskin yang berhak mendapatkan beasiswa itu. Nama siswa penerima beasiswa juga harus ditempel di papan pengumuman sekolah," ujarnya.

Menurut dia, dengan ditempel di papan pengumuman, jangan sampai siswa yang menerima itu anak yang mungkin dekat dengan guru, anak guru, bahkan siswa yang perekonomiannya mampu. "Sedangkan beasiswa itu nanti ditransfer ke rekening sekolah, karena kami khawatirkan jika langsung diberikan pada siswa akan dihabiskan langsung untuk hal-hal di luar pembelajaran," tandas TIA. **ant**

Edisi : Sabtu, 8 Agustus 2015

Hal : 14